



Implementasi Kebijakan COVID-19 di Pondok Pesantren: Studi Kasus Pondok Pesantren Jamil Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap

***Elita Hermawanti**

Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, Universitas Negeri Semarang
Email: elitahermawanti@students.unnes.ac.id

Fadly Husain

Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, Universitas Negeri Semarang
Email: fadlyhusain@mail.unnes.ac.id

*Korespondensi

Article History: Received: 20-06-2023, Revised: 03-07-2023, Accepted: 12-07-2022, Published: 24-07-2023

Abstrak

Implementasi kebijakan COVID-19 merupakan hasil dari penyesuaian kondisi yang ada di dalam lingkungan pondok pesantren. Dengan adanya implementasi kebijakan COVID-19 menyebabkan adanya penataan ulang sosial termasuk ke dalam dunia pendidikan. Tujuan penelitian ini memahami implementasi kebijakan COVID-19 di lingkungan Pondok Pesantren Jamil dan mengidentifikasi tanggapan yang ditunjukkan oleh warga Pondok Pesantren Jamil terhadap implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis studi kasus yang menghasilkan data secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kiai menjadi pengambil keputusan terpenting. Penentu penerapan implementasi berdasarkan kondisi dari pondok pesantren dalam bidang pendidikan dan kesehatan yang dibagi ke dalam dua kebijakan yaitu *dzohir* (fisik) dan *bathiniyah* (batin). Hal tersebut menimbulkan berbagai tanggapan dari warga pondok pesantren khususnya santri. Tanggapan tersebut masuk ke dalam lima aspek yaitu rekomendasi kesehatan, sikap terhadap pemerintah, stigma, agama, dan identitas pribadi. Implementasi kebijakan melalui pendekatan melalui agama dan pemuka agama yang disegani lebih bisa diterima oleh warga pondok pesantren dibandingkan dengan kebijakan yang hanya dikeluarkan oleh pemerintah.

Kata Kunci:

implementasi; kebijakan covid-19; pondok pesantren; tanggapan

Abstract

The implementation of the COVID-19 policy is the result of adjusting the existing conditions within the Islamic boarding school environment. With the implementation of the COVID-19 policy causing a social rearrangement included in the world of education. The purpose of this study is to understand the implementation of the COVID-19 policy in the Jamil Islamic Boarding School environment and identify the responses shown by Jamil Islamic Boarding School residents to the implementation of the policy. This research uses qualitative methods of the case study type that produce descriptive data. The results of the research show that the Kiai are the most important decision-makers. The determinants of the application of implementation are based on the conditions of Islamic boarding schools in the fields of education and health which are divided into two policies namely *zhohir* (physical) and *bathiniyah* (inner). This raises various responses from residents of Islamic boarding schools, especially students. These responses fall into five aspects, namely health recommendations, attitudes toward the government, stigma, religion, and personal identity. Implementation of

policies through approaches through religion and respected religious leaders is more acceptable to Islamic boarding school residents compared to policies issued only by the government.

Keywords:

covid-19 policy; implementation; islamic boarding schools; responses



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Pendahuluan

Virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-Cov-2) atau dikenal dengan COVID-19 merupakan virus endemi dari Wuhan, China dan telah ditetapkan menjadi pandemi pada tanggal 11 Maret 2020 oleh WHO sudah tiga tahun lamanya. WHO menyatakan virus ini menyerang sistem pernafasan dan imun tubuh manusia yang ditularkan melalui cipratan air liur (droplet) seseorang. Jika orang tersebut memegang benda disekitar lalu menyentuh hidung, mulut, dan mata maka berpotensi menjadi alur transmisi penularan COVID-19. Alur transmisi penularan COVID-19 yang mudah menyebar, membuat pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mencegah penyebaran virus ini termasuk di dunia pendidikan.

Salah satunya pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis agama Islam dengan sistem asrama (*boarding*). Secara umum, pondok pesantren dibagi ke dalam 2 (dua) model yaitu pondok pesantren tradisional (salafi) dan pondok pesantren modern (Dhofier, 1985). Perbedaan dari kedua model pondok pesantren tersebut yaitu pada sistem pembelajaran dan *output* yang dihasilkan. Pada pesantren tradisional Kiai memiliki kekuasaan besar dan absolut. Kiai memiliki teknik dalam mengajar ilmu agama secara langsung melalui *sorogan* (mengaji secara mandiri dibimbing oleh Kiai) dan *bandongan* (proses belajar bersama dengan santri memperhatikan Kiai). Berbeda dengan pondok pesantren modern yang memiliki sistem campuran antara sekolah umum dengan tradisi pesantren yaitu Kiai lebih bersifat fungsional (Muashomah, 2016).

Terdapat kesamaan sistem dari pesantren tradisional dan modern yaitu sistem asrama. Sistem asrama mengharuskan santri untuk hidup bersama setiap harinya. Kehidupan bersama setiap hari akan menimbulkan kerumunan yang mempermudah transmisi penularan COVID-19. Laju transmisi COVID-19 terjadi di Kabupaten Cilacap sebagai kabupaten terluas di Jawa Tengah disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, pada akhir tahun 2020 menjelang awal 2021 terjadi lonjakan pada klaster pondok pesantren dengan 348 santri terpapar COVID-19 setiap harinya (Serayunews.com, 2020) salah satunya pondok pesantren di Kecamatan Kesugihan.

Menurut data Puskesmas Kecamatan Kesugihan tahun 2020-2021 sekitar 163 santri terpapar COVID-19 dari berbagai pondok pesantren. Namun, tidak semua pondok pesantren terbuka mengenai kondisi pondok pesantren seperti yang terjadi di Pondok Pesantren Jamil (nama yang disamarkan karena pondok pesantren tidak ingin pondok mendapatkan stigma buruk dalam masyarakat) sebagai tempat studi kasus dalam penelitian ini. Pondok Pesantren Jamil merupakan pondok pesantren salaf (tradisional) yang memiliki jumlah santri putri 32 dan santri putra 30 yang mayoritas pelajar sehingga dikenal sebagai asrama pelajar Islam. Dengan kegiatan keagamaan yang terjadwal setiap hari, minggu, bulan, dan tahunan yang dipimpin

langsung oleh Kiai. Setelah dikeluarkan kebijakan COVID-19 terdapat pilihan dari pondok pesantren untuk tidak melaksanakan kegiatan atau tetap melaksanakan kegiatan sesuai dengan protokol kesehatan.

Dengan hal ini, pondok pesantren mengimplementasikan kebijakan COVID-19 sebagai tanggapan atas adanya COVID-19, antara lain dilakukan oleh Luth & Meriwijaya (2021), Salim et al (2021), Baidowi et al (2021), Hannan, A., Azizah, S., & Atiya (2020), sebagai berikut;

Dalam penelitian Luth & Meriwijaya (2021), upaya yang dilakukan berasal dari kebijakan pemerintah yang telah umum diterapkan pada sekolah dengan sistem asrama meliputi upaya pencegahan dan penanganan secara cepat dan efektif. Dalam penelitian lainnya dijelaskan pada masa Pandemi COVID-19 pondok pesantren tetap melaksanakan kegiatan seperti biasa. Hal ini seperti penelitian Salim et al (2021) menjelaskan bahwa pondok pesantren tetap melakukan kegiatan seperti biasa karena khawatir jika santri diliburkan atau belajar di rumah akan mengurangi peran santri dan mengurangi karakter santri di masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah.

Baidowi et al (2021) menemukan beberapa pondok pesantren daerah Yogyakarta memiliki cara tersendiri dalam menanggapi COVID-19 yaitu dengan modifikasi protokol kesehatan dengan ikhtiar spiritual yaitu pembacaan ayat-ayat tertentu dalam Al-Qur'an, doa-doa, *hizib* (kumpulan doa tertentu) dan pembacaan doa tertentu sebelum minum air. Peneliti melihat kepada aspek teologis dimana spiritual dimasukan supaya membentuk sifat sabar dan pasrah serta dapat meningkatkan daya tahan tubuh sehingga menjadi pelindung diri terhadap penyebaran virus COVID-19.

Pendekatan teologis juga dilakukan dalam penelitian Hannan, A., Azizah, S., & Atiya (2020), tanggapan terhadap adanya COVID-19 di berbagai pondok pesantren yang ada di Madura yaitu konservatif dan non-konservatif yang membuat pondok pesantren tersebut akan mengimplementasikan kebijakan COVID-19. Adanya pemahaman yang non konservatif dan konservatif di pondok pesantren yang disebabkan oleh pemimpin pondok pesantren sehingga terdapat pendekatan yang diperlukan yaitu struktural-medis dan kultural keagamaan.

Dari hasil penelitian di atas pondok pesantren memiliki berbagai tanggapan yang berbeda atas adanya COVID-19 dengan keterbukaan dari pondok pesantren terutama mengenai kondisi pondok pesantren. Namun, dalam penelitian tersebut tidak dijelaskan mengenai tanggapan pondok pesantren mengenai kebijakan yang ada dari pemerintah terkait pendidikan berbasis agama Islam dan pondok pesantren yang tidak terbuka dengan pemerintah. Dengan hal ini, pentingnya membahas mengenai implementasi di pondok pesantren yang tidak terbuka dan tanggapan yang ada dari adanya implementasi kebijakan COVID-19.

Dari penelitian sebelumnya, keterbaruan dalam penelitian ini adalah penulis akan meneliti implementasi kebijakan COVID-19 yang sesuai dengan kondisi di Pondok Pesantren Jamil sebagai pondok pesantren salaf yang tidak terbuka dengan adanya COVID-19 dan dianalisis menggunakan teori dari Hahn & Schoch-Spana, (2021) mengenai kesehatan yaitu *Health Determination of Society dan The Social Organization of Public Health Responses*. Teori tersebut menjelaskan adanya penataan ulang sosial karena COVID-19 yang cepat akan menimbulkan berbagai tanggapan di dalam masyarakat. Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian ini adalah memahami implementasi kebijakan COVID-19 di lingkungan Pondok Pesantren Jamil dan

mengidentifikasi tanggapan yang ditunjukkan oleh warga Pondok Pesantren Jamil terhadap implementasi kebijakan yang ada sehingga dapat menjadi penelitian kesehatan di masa pandemi mendatang.

Metode

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kasus di Pondok Pesantren Jamil Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap menghasilkan data secara deskriptif dalam bentuk kata-kata. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi (Creswell, 2016). Penulis melakukan pengamatan tidak langsung yaitu setelah kasus COVID-19 sudah tidak tinggi sehingga ada beberapa kebijakan yang sudah tidak diterapkan. Untuk memahami hal tersebut, penulis mendalami melalui wawancara. Penulis mengamati kondisi lingkungan pondok pesantren seperti sarana dan prasarana untuk mengimplementasikan kebijakan COVID-19. Selain itu, penulis mengamati cara warga pondok pesantren dalam memberikan tanggapan dari adanya kebijakan yang diterapkan di masa pandemi COVID-19.

Penulis melakukan wawancara secara mendalam kepada 12 informan. Dengan menentukan dua informan kunci yang memahami kondisi saat kebijakan COVID-19 masih diterapkan secara ketat sehingga dapat menjelaskan dengan rinci. Penulis memilih informan kunci yaitu Kiai Huda sebagai pemimpin pondok pesantren dan Nyai Ufid sebagai pengasuh santri putri di pondok pesantren. Dengan delapan informan utama untuk memberikan penjelasan yang diketahui yaitu pengurus santri putra dan putri, santri kalong, dan santri yang pernah memiliki gejala COVID-19. Selanjutnya terdapat dua informan pendukung yaitu Kepala Dusun Kesugihan dan Ketua Satgas Desa Kesugihan dengan tujuan untuk mendapatkan tambahan penjelasan yang belum terjawab. Dokumentasi didapatkan oleh penulis secara langsung dan beberapa dari informan dalam bentuk foto.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Kebijakan COVID-19 di Pondok Pesantren Jamil

Kebijakan COVID-19 untuk lembaga pendidikan berbasis Islam oleh Kementerian Agama dimuat dalam website kemenag.go.id (2020). Termasuk Pondok Pesantren Jamil yang mendapatkan informasi kebijakan mengenai mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas (5 M) diturunkan dalam beberapa penjelasan, meliputi; 1) Pendidikan berbasis agama baik berasrama dan tidak berasrama memiliki ketentuan protokol kesehatan yang sama; 2) Lingkungan pondok pesantren yang berada di dalam ruangan maupun diluar ruangan disarankan untuk dibersihkan secara berkala menggunakan disinfektan di titik-titik tempat yang sering disentuh seperti saklar lampu, handel pintu, lantai masjid, dan beberapa titik tempat untuk belajar santri; 3) Terdapat tempat sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) ataupun penyediaan *hand sanitizer* jika tidak ada air; 4) Terdapat promosi kesehatan di tempat yang mudah terlihat baik secara langsung maupun melalui sosial media; 5) Membudayakan untuk selalau memakai masker, menjaga jarak, CTPS, dan menerapkan etika batuk dan bersin yang benar; 6) Jika memiliki riwayat berkunjung ke daerah yang terkena virus 14 hari segera melaporkan diri; 7) Memiliki peralatan pribadi baik penggunaan AI

Quran maupun kitab lainnya dan peralatan ibadah yang rutin dibersihkan setiap minggunya; 8) Menghindari untuk menggunakan peralatan mandi dan handuk dengan bergantian bagi lembaga pesantren dan pendidikan keagamaan yang berasrama; 9) Kegiatan fisik dianjurkan dilakukan setiap pagi dan memilih makanan yang sehat dan bergizi untuk menjaga kesehatan fisik dan meningkatkan imun tubuh; 10) Pemeriksaan kesehatan yang rutin untuk warga pesantren dengan minimal 1 (satu) minggu sekali untuk mengamati kondisi masing-masing individu; 11) Pengecekan suhu tubuh dengan batas maksimal $37,3^{\circ}\text{C}$, jika lebih dari suhu tersebut warga pesantren harus melakukan isolasi mandiri dan menghubungi petugas kesehatan supaya mendapatkan penanganan langsung; 12) Terdapat pemisahan antara ruang isolasi dengan ruang untuk kegiatan pembelajaran dan kegiatan lainnya; 13) Terdapat sabun dan pengering tangan di sekitar tempat CTPS sehingga mudah untuk dijangkau; 14) Menjaga keseimbangan gizi makanan yang dimasak dan kebersihan dari juru masak seperti menggunakan masker dan sarung tangan.

Peraturan yang sudah ada tersebut merupakan tanggung jawab bersama dan seharusnya dipatuhi oleh semua *stake holder* yang terlibat sehingga mencapai tujuan yang diinginkan yaitu mengurangi laju COVID-19. Selaras dengan penjelasan Nugroho, (2021) implementasi kebijakan merupakan usaha dari pemerintah, masyarakat, dan tokoh masyarakat untuk mencapai tujuan yang direncanakan bersama. Namun, terdapat hambatan untuk mengimplementasikan kebijakan COVID-19 termasuk di Pondok Pesantren Jamil. Hambatan utama dari tidak diterapkannya kebijakan tersebut adalah fasilitas yang kurang memadai di Pondok Pesantren Jamil. Kurangnya fasilitas tersebut terlihat secara langsung dari tidak adanya pagar pembatas antara pondok pesantren dengan lingkungan warga.

Dengan tidak adanya pagar pembatas membuat pondok pesantren cukup kesulitan dalam membatasi interaksi santri dengan lingkungan luar. Selain itu, Pondok Pesantren Jamil tidak memiliki ruang yang cukup sehingga tidak memiliki tempat seperti Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) untuk menerapkan kebijakan kesehatan. Padahal dalam penelitian Zahrotin (2021) poskestren yang menjadi posisi paling strategis untuk mempermudah warga pondok mendapatkan fasilitas kesehatan terutama untuk pendataan santri yang bergejala COVID-19. Hambatan tersebut disebabkan oleh Pondok Pesantren Jamil tidak dinaungi oleh yayasan sehingga tidak memiliki anggaran untuk menerapkan fasilitas.

Hal ini disebabkan oleh Kiai sebagai pemegang keputusan atas kebijakan yang diterapkan meski pondok pesantren memiliki struktur kepengurusan. Dari hasil penelitian Noor (2019) struktur kepengurusan tidak terlalu berperan penting dalam pengambilan keputusan tetapi keputusan Kiai memiliki otoritas dan harus dilaksanakan oleh semua warga pondok pesantren. Pihak pondok pesantren tidak ingin ada intervensi dari pihak luar dalam kepengurusan di pondok pesantren. Adanya intervensi dari pihak luar dianggap dapat menghilangkan citra asli Pondok Pesantren Jamil sebagai pondok pesantren salaf. Termasuk pengambil keputusan dalam penerapan kebijakan dari pemerintah di Pondok Pesantren Jamil. Jika keputusan Kiai tidak menyetujui atas suatu kebijakan maka kebijakan tersebut tidak akan diimplementasikan. Hal ini disampaikan oleh pemimpin Pondok Pesantren Jamil yaitu Kiai Huda (50 tahun):

“Pondok pesantren memang tidak dinaungi oleh suatu Yayasan karena biar gampang dan fokus santri bukan pada biaya yang besar. Disini kami juga berlandaskan kekeluargaan jadi kita saling menjaga satu sama lain. Dari jumlah santri yang adapun tidak banyak jadi kita memang gampang untuk mengontrol santri termasuk waktu sakit” (Wawancara dengan Kiai Huda, 31 Desember 2022).

Dengan adanya hambatan tersebut Kiai Huda menjadi pengambil keputusan kebijakan yang akan di terapkan. Keputusan Kiai Huda dalam mengambil kebijakan COVID-19 menjadi keputusan yang terbaik di Pondok Pesantren Jamil. Selaras dalam hasil penelitian Prawoto et al (2020) bahwa Kiai memiliki peran *preventif* besar dalam pencegahan penularan COVID-19. Adanya penyesuaian kondisi membuat implementasi pondok pesantren dibagi ke dalam dua fokus yaitu pendidikan dan kesehatan.

a. Implementasi Kebijakan Pendidikan

Kebijakan COVID-19 dalam pendidikan yaitu adanya kolaborasi Pondok Pesantren Jamil bersama sekolah umum. Dikenal sebagai asrama pelajar tidak membuat Pondok Pesantren Jamil mendirikan sekolah formal yang didirikan atas nama pondok. Oleh karena itu, santri Pondok Pesantren Jamil bebas menimba ilmu di sekolah sekitar kecamatan Kesugihan, di mulai dari SMP, SMA, dan Universitas. Kebebasan diberikan oleh pondok pesantren kepada santri supaya santri memiliki waktu luang untuk menimba ilmu dan pengalaman di dunia luar. Salah satunya para santri harus bersekolah dari pagi hingga siang maupun sore dengan harapan santri tidak mengalami ketertinggalan dari kemajuan pendidikan meski berada di pondok pesantren salaf.

Namun, santri tetap harus mengikuti aturan dan pembelajaran di pondok pesantren setelah pulang dari sekolah. Dalam hasil penelitian Sumardi (2012) dengan proses pembelajaran *riyadah* (latihan spiritual) oleh Kiai tidak dilakukan di dalam ruangan kelas tetapi di dalam kehidupan sehari-hari menjadikan *best practice* untuk santri sehingga karakter yang terbentuk bukan hanya berorientasi kepada dunia tetapi pada makna kehidupan (*ukhrowi*) dan kepada Allah SWT (*taqorub*). Hal ini berlangsung seperti biasa sebelum kebijakan pandemi COVID-19 diterapkan dari pemerintah untuk mengurangi laju transmisi COVID-19.

Terdapat dua jenis santri di Pondok Pesantren Jamil yaitu santri *mondok* dan santri *jolokan* (*kalong*). Kedua jenis santri tersebut hanya di bedakan dari kuantitas mereka belajar di pondok dan mengikuti kegiatan pondok. Pada umumnya, santri *jolokan* hanya datang untuk mengaji dan langsung pulang. Berbeda dengan santri *mondok* yang harus menetap di pondok dan mengikuti kegiatan serta aturan di pondok setiap harinya. Lalu untuk santri *mondok* sendiri memiliki kepengurusan untuk mengatur jalannya kegiatan dan kebutuhan santri sedangkan santri *kalong* tidak ada di dalam kepengurusan tersebut.

Dalam implementasi pendidikan untuk santri *mondok* pondok pesantren mengosongkan beberapa ruangan untuk belajar daring para santri. Untuk melancarkan kegiatan pembelajaran pondok pesantren bekerja sama dengan sekolah-sekolah santri. Pondok pesantren memiliki jadwal yang ketat dalam pembelajaran

daring yaitu dengan pembentukan kelompok belajar sesuai dengan tingkat pendidikannya. Masing-masing kelompok memiliki satu pengawas untuk mengawasi kegiatan pembelajaran. Santri putra diizinkan membawa barang elektronik seperti *handphone* dan laptop untuk menunjang belajar sedangkan santri putri dilarang membawa alat elektronik sehingga santri putri harus bergantian menggunakan alat elektronik dari pondok pesantren.



(a)



(b)

Gambar 1. Ruang belajar santri (Sumber: Dokumentasi pondok pesantren, 2021)

b. Implementasi Kebijakan Kesehatan

Selain kebijakan pendidikan, terdapat kebijakan kesehatan yang diimplementasikan di Pondok Pesantren Jamil ke dalam dua kelompok yaitu *dzohir* (fisik) dan *bathiniyah* (batin). Hal ini sesuai dalam penelitian Arifin & Zaini (2020) mengenai cara mencegah penularan COVID-19 yaitu dengan menjaga kesehatan fisik santri dan batin menjadi proses penyembuhan depresi akibat COVID-19. Kebijakan kesehatan secara *dzohir* (fisik) merupakan implementasi kebijakan dengan meningkatkan imun tubuh melalui usaha-usaha fisik sehingga diharapkan kesehatan akan terjaga dari virus dan bakteri.

Membersihkan lingkungan Pondok Pesantren Jamil secara berkala merupakan wujud dari kebijakan *dzohir*. Pondok pesantren membuat jadwal bersih-bersih setiap satu minggu sekali pada hari Jumat. Santri akan membersihkan bagian dalam sampai luar pondok pesantren. Hal ini dilakukan guna mencegah penularan COVID-19 dan demam berdarah di pondok pesantren. Kegiatan bersih-bersih menjadi kegiatan yang dilakukan secara rutin semenjak adanya pandemi COVID-19 sampai saat ini.



Gambar 2. Kegiatan bersih-bersih untuk mencegah penularan COVID-19 (Sumber: Dokumentasi pondok pesantren, 2021)

Wujud lain dari kebijakan *dzohir* yaitu pembuatan sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS). Pembuatan sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) di Pondok Pesantren Jamil dibuat oleh kepala dusun dan satgas setempat. Dengan adanya CTPS cukup membantu perubahan perilaku santri dalam menjaga kebersihan. Sebelum adanya CTPS santri jarang mencuci tangan tetapi setelah adanya CTPS ini santri lebih peduli dengan kebersihan tangannya. Hal ini dapat terlihat pada kegiatan saat ingin makan dan setelah beraktivitas.



Gambar 3. Penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun (ctps) (Sumber: Dokumentasi penulis, 2022)

Selain itu, Pondok Pesantren Jamil memberikan jadwal berolah raga kepada santri setiap minggu untuk berjalan pagi disekitar pondok pesantren. Berjalan kaki setiap pagi diharapkan santri akan mendapatkan sinar matahari yang cukup. Berjalan pagi diikuti hampir oleh seluru santri putri sedangkan santri putra memilih untuk bermain sepak bola di lapangan dekat Pondok Pesantren Jamil. Aktivitas olahraga ini berlangsung selama dua tahun selama pada masa pandemi COVID-19.

Untuk menangani santri yang bergejala dan mencegah penularan COVID-19 isolasi mandiri di rumah menjadi wujud dari kebijakan *dzohir*. Isolasi mandiri di rumah disebabkan oleh Kiai Huda sebagai pemimpin Pondok Pesantren Jamil melarang santri yang bergejala berat untuk berobat di Puskesmas. Selain itu, pondok pesantren sengaja tidak menyediakan ruang isolasi karena tidak ada ruang yang cukup. Kiai merasa dengan tidak ada ruang isolasi untuk para santri membuat santri lebih menjaga kesehatan dan tidak merasa khawatir terhadap COVID-19. Hal ini disampaikan oleh pemimpin pondok yaitu Kiai Huda (50 tahun):

“Kulo melarang santri berobat teng puskesmas nek mboten teng tempat kesehatan sing pro covid, soale mangke dipersulit kangge sehat. Padahal santri asline mboten kenging nopo-nopo. Terus ruang isolasi seadanya kangge santri niku malah mboten onten rasa pengin sakit ngonten dadose milih teng kamar terus saget dirumat teng rencange.”

“Saya melarang santri untuk berobat ke puskesmas atau ke tempat kesehatan yang pro covid karena nanti dipersulit untuk sehat. Padahal dari santri aslinya tidak apa-apa. Termasuk ruang isolasi saya buat sederhana supaya santri tidak ada rasa ingin sakit. Misalpun sakit, tidak berpikir sakit parah jadi bisa tidur di kamar dan bisa dirawat oleh temannya” (Wawancara dengan Kiai Huda, 31 Desember 2022).

Disaat santri melakukan isolasi mandiri maka dibebaskan dari kegiatan pembelajaran di Pondok Pesantren Jamil sampai benar-benar pulih. Umumnya santri akan dipulangkan selama sepuluh hari atau lebih jika belum pulih. Santri dapat kembali ke Pondok Pesantren Jamil dengan kondisi yang sehat dan tidak ada gejala COVID-19 seperti batuk dan pilek. Namun, untuk santri bergejala ringan COVID-19, Nyai Ufid membuat alternatif obat menggunakan bahan tradisional yaitu dari kunyit dan temulawak yang diparut dan diperas. Pondok pesantren lebih memilih menggunakan bahan alami untuk menyembuhkan gejala ringan COVID-19 dibandingkan dengan berobat ke Puskesmas.

Selain itu, Pondok Pesantren Jamil tidak membentuk Satgas COVID-19 dalam penanganan COVID-19 disebabkan oleh kurangnya jumlah santri dan dikhawatirkan akan mengganggu kegiatan lainnya. Dengan hal tersebut, adanya santri *ndalem* terdiri dari dua santri putri dan dua santri putra di Pondok Pesantren Jamil memiliki tugas untuk mobilitas keluar seperti berbelanja, mengambil tugas santri dari sekolah-sekolah dan menjadi narahubung Pondok Pesantren Jamil dengan pihak luar. Jika terdapat santri sakit, maka santri *ndalem* akan memastikan kebutuhan obat santri dan mencatat santri yang sakit serta mencatatat santri yang dikhawatirkan bergejala COVID-19 sehingga harus dipulangkan ke pihak keluarga.

Selain secara *dozahir*, Pondok Pesantren Jamil mengimplementasikan kebijakan untuk kesehatan secara *bathiniyah*. Kebijakan kesehatan *bathiniyah* menjadi strategi paling mudah diterapkan untuk para santri dan pengasuh di pondok pesantren. Hal ini karena mereka meyakini dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT akan mempercepat proses penyembuhan dan meningkatkan kekebalan tubuh manusia. Selaras dalam hasil penelitian Alhamuddin & Rosyadi Satria Hamdani (2018), untuk mencapai tujuan utama pondok pesantren menanamkan rasa keagamaan yang kuat dan terbukti mampu menanamkan jiwa dan mentalitas positif bagi pribadi para

santri. Untuk dapat sepenuhnya menanamkan jiwa seperti itu dibutuhkan waktu yang tidak sebentar.

Pondok pesantren mewajibkan *wirid* (membaca bacaan dzikir sehabis solat) dalam berbagai situasi dan kondisi seperti bertemu dengan orang luar, berjabat tangan, saat sakit, dan aktivitas lainnya. Dalam hal ini, berjabat tangan tetap menjadi suatu kebiasaan yang sudah melekat dan sulit untuk ditinggalkan karena bagi mereka berjabat tangan akan saling menggugurkan dosa dan santri akan mendapatkan berkah.

“*Ngge nek bar wirid niku kulo adem, nah salaman kan maraken berkah ngge nek niku diicalken istilaeh mangke berkaeh kirang ngonten. Aja maning kale bu nyai kale pak Kiai.*” “Setelah *wirid* saya merasa tenang dan salaman memberikan berkah untuk itu jika dihilangkan maka berkahnya akan kurang apalagi jika salaman dengan bu nyai dan pak Kiai (Wawancara dengan Salwa, 22 Desember 2022).

Setelah itu, Kiai Huda selalu berdoa setelah salat berjamaah supaya diberikan ketenangan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Selain itu, setiap minggunya pondok pesantren mengadakan kegiatan mengaji bersama. Dengan hal tersebut diharapkan santri dapat menjadi lebih tenang dalam menghadapi situasi yang tidak baik.

Wirid dan doa yang berbunyi;

الْمَانِعُ

Al-Mâni`u

Yang Maha Mencegah

الْمُحْيِي

Al-Muhyi

Yang Maha Menghidupkan

الْوَالِيُّ

Al-Waliyyu

Yang Maha Melindungi

النَّافِعُ

An-Nâfi`u

Yang Maha Memberi Manfaat

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Bismillahilladzi laa yadhurru ma'asmihî syai-un fil ardhi wa laa fis samaa' wa huwas samii'ul 'aliim.

Artinya: “Dengan nama Allah yang bila disebut, segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya, Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Selaras dalam penelitian Baidowi et al (2021) ikhtiar spiritual yaitu pembacaan ayat-ayat tertentu dalam Al-Qur'an, doa-doa, *hizib* (kumpulan doa tertentu) dan pembacaan doa dapat meningkatkan rasa ketenangan diri. Ketenangan ini menjadi kunci dalam meningkatkan imun tubuh sehingga tubuh tidak mudah sakit. Hal ini tidak dilihat secara langsung tetapi dapat dirasakan oleh masing-masing santri. Dengan hal tersebut implementasi kebijakan *bathiniyah* menjadi kebijakan yang lebih mudah diterima dibandingkan dengan kebijakan *dzohir* (fisik).

Implementasi kebijakan COVID-19 merupakan suatu perubahan tatanan sosial seperti yang dijelaskan dalam teori *Health Determination of Society* yaitu dengan memaksa semua orang untuk mengikuti kebijakan tersebut. Penataan ulang sosial yang menyebabkan perubahan terjadi akibat adanya implementasi kebijakan COVID-19 di Pondok Pesantren Jamil dalam beberapa hal. Pertama, perubahan komunikasi antara anggota pondok pesantren dengan pihak luar. Ini dirasakan karena terdapat himbauan yang diterapkan pada saat proses menjenguk santri dan berlangsung selama dua tahun. Keluarga santri yang ingin menjenguk diminta menunggu di teras *ndalem* Kiai untuk santri putra dan teras *ndalem* nyai untuk santri putri. Lalu mereka diberikan waktu selama 30 menit untuk mengobrol. Setelah itu, harus sudah selesai dan kembali ke tempatnya masing-masing.

Kedua, perubahan sistem pendidikan. Pondok pesantren harus menyiapkan tempat untuk belajar daring para santri dan membuat peraturan dalam prosesnya. Pihak pondok pesantren berkolaborasi dengan pihak sekolah dari santri supaya santri tetap bisa mengikuti pembelajaran. Dengan hal ini, pondok pesantren harus mengubah beberapa jadwal kegiatan di pondok pesantren. Hal ini disebabkan santri mayoritas di Pondok Pesantren Jamil adalah seorang pelajar.

Ketiga, berkurangnya Komuter. Santri yang awalnya pulang seminggu sekali menjadi pulang minimal dua minggu sekali dan pondok pesantren menyarankan untuk pulang pada saat hari raya Islam. Hal ini terus berlanjut sampai saat ini. Selain itu, santri menyertakan surat keterangan sehat pada saat mendaftar menjadi santri mondok di pondok pesantren. Selain itu, pada masa pandemi COVID-19 pendaftar santri kalong dikurangi jumlahnya. Selama pandemi COVID-19 santri kalong mengaji hanya sampai jam 09.00 WIB yang sebelumnya sampai 11.00 WIB malam.

Terjadinya perubahan sosial di atas secara cepat harus diikuti oleh warga Pondok Pesantren Jamil. Pondok Pesantren Jamil yang telah memiliki aturan sendiri harus mau berubah diluar kontrolnya. Jika tidak mengikuti akan mengakibatkan kerugian pada Pondok Pesantren Jamil maupun orang lain dalam ranah publik. Dalam hal ini, pondok pesantren dipaksa untuk mengubah tatanan sosial oleh pemerintah tetapi segala keputusan ditentukan oleh pemimpin seperti di Pondok Pesantren Jamil.

Tanggapan Pondok Pesantren Jamil terhadap Implementasi Kebijakan COVID-19

Implementasi kebijakan COVID-19 secara masif membuat perubahan pada sistem komunikasi, pendidikan, dan komuter menimbulkan berbagai tanggapan. Menurut Muslimin (2015: 85) tanggapan merupakan hasil dari reaksi manusia yang menjadi daya dorong untuk melakukan tindakan untuk selanjutnya. Terdapat lima aspek tanggapan muncul akibat dari implementasi kebijakan COVID-19 dijelaskan dalam teori pendekatan yaitu teori *The Social Organization of Public Health Responses* yang terlihat dari penelitian ini. Hasil lima aspek tersebut memperlihatkan adanya tanggapan positif dan negatif dari warga Pondok Pesantren Jamil.

a. Rekomendasi Kesehatan

Adanya rekomendasi kesehatan dari pemerintah terkait kebijakan COVID-19 yang diterapkan untuk institusi pendidikan guna mencegah dan mengurangi laju transmisi COVID-19. Dalam penelitian Israfil et al (2020) menemukan lima faktor risiko kematian pada pasien COVID-19, meliputi usia, komplikasi COVID-19, daya tahan tubuh, penyerta (*cormobidity*), dan fasilitas pengobatan. Dengan hal tersebut, kebijakan COVID-19 yang diterapkan khusus di pondok pesantren Jamil menimbulkan berbagai tanggapan dari yang dipahami. Salah satunya santri laki-laki yaitu Naim (17 tahun) memahami adanya kebijakan COVID-19 akan mengurangi penularan COVID-19 tetapi merugikan pihak pondok pesantren. Disebabkan oleh pemerintah yang mempersulit acara besar keagamaan yang biasa dilaksanakan setiap tahunnya.

“*katah acara sing dibatalken, soale dilarang ngonten tapi onten acara sing tetep onten ngagem protokol kesehatan.*” “Banyak acara yang dibatalkan karena dilarang tapi ada acara tetap dilaksanakan dengan menggunakan protokol kesehatan.” (Wawancara dengan Naim, 23 Desember 2022).

Namun, terdapat santri yang memakai masker hanya untuk menghargai Kiai meskipun dirinya tidak mau memakai masker. Alasan mereka tidak mau memakai masker karena menurut mereka memakai masker tidak menjamin kesehatan. Selaras dengan penelitian Siregar et al (2020) menjelaskan dampak pemakaian masker dalam waktu yang panjang akan menyebabkan iritasi kulit, sesak nafas, dan migrain.

Santri putri memiliki pemahaman adanya kebijakan COVID-19 untuk mengurangi COVID-19 yang harus dipatuhi. Dengan hal ini santri putri dikenal sebagai santri yang patuh terhadap perintah dari pengasuh. Berbeda dengan santri putra, yang menganggap kebijakan COVID-19 tidak berpengaruh terhadap laju transmisi COVID-19. Menurut Isna sebagai ketua pengurus santri putri di Pondok Pesantren Jamil, santri menjadi rajin dalam menjaga kebersihan diri dan mau untuk memakai masker tetapi hanya untuk keluar.

“Semenjak adanya covid dan ada kebijakannya, pengurus santri putri lebih mengetatkan lagi jadwal piket harian. Terutama mencatat siapa yang akan berpergian contoh ke pasar dan santri yang izin untuk pamit pulang” (Wawancara dengan Isna, 18 Desember 2022).

Dengan hal tersebut terlihat bahwa warga pondok pesantren tetap melaksanakan beberapa kebijakan COVID-19. Warga Pondok Pesantren harus menyesuaikan keperluan mereka seperti memakai masker, membawa *handsanitazier*, berjemur, dan lebih rajin membersihkan lingkungan pondok pesantren. Warga pondok pesantren akan melakukan rekomendasi kesehatan yang dianggap tidak merugikan. Namun, jika jika dianggap merugikan dalam keperluan ibadah maka tidak akan dilakukan.

b. Sikap terhadap Pemerintah

Warga pondok pesantren yang menyambut baik akan adanya kebijakan dari pemerintah tetapi tidak selaras dengan tanggapan yang dilihatkan. Adanya kebijakan COVID-19 dianggap menghalangi kegiatan santri dan peran santri menjadi

berkurang. Oleh sebab itu, pondok pesantren tidak terlalu terbuka dengan kondisi santri jika memiliki gejala COVID-19 di pondok pesantren.

Menurut Isna (17 tahun) sebagai pengurus santri putri siswi kelas 11 SMA bahwa adanya kebijakan COVID-19 membuat belajar di sekolah menjadi terhambat karena akses yang kurang memadai. Hal ini cukup merugikan Isna untuk mempersiapkan tes menuju perkuliahan.

“Kulo ketinggalan informasi penting kados beasiswa, kale perkuliahan. Nah mergane teng pondok selama COVID-19 tetep mboten pareng mbeto handphone sedanten. Terus dibatesi jam belajar mukur dugi bar duhur. Terus hp ne dikumpulkan, santri istirahat sekedap bar niku ngaji dugi sonten.” “Saya ketinggalan informasi penting seperti beasiswa dan perkuliahan dari sekolah. Soalnya di pondok selama COVID-19 masih tidak diperbolehkan membawa hp semua. Jadi kita belajar hanya sampai habis duhur lalu hpnya dikumpulkan, santri istirahat sebentar setelah itu ngaji sampai sore.” (Wawancara dengan Isna, 18 Desember 2022).

Tanggapan yang hampir sama ditunjukkan oleh Kiai Huda sebagai pemimpin Pondok Pesantren Jamil yang ditunjukkan dengan adanya kebijakan yang tidak diterima seperti memeriksakan diri ke Puskesmas. Jika santri diperiksakan ke Puskesmas dikhawatirkan akan dilakukan *swab* yang hasilnya positif sehingga pondok pesantren harus *lockdown*. Dengan kebijakan *lockdown* membuat segala kegiatan menjadi terhambat. Selaras dari penelitian Munawaroh et al (2021) penerapan kebijakan *lockdown* membuat kegiatan pondok pesantren menjadi terhambat dan memunculkan rumor tidak baik tentang pondok pesantren.

Selain itu, pemberitaan yang berlebihan oleh instansi kesehatan membuat masyarakat percaya meski tidak sesuai fakta di lapangan. Hal tersebut membuat Kiai khawatir sehingga pondok pesantren tidak pernah mengatakan jika terdapat santri yang memiliki gejala.

“Nek santri berobat teng nggon kesehatan sing pro COVID-19, mangke kabeh kegiatan teng pondok bakal di tutup terus dewe disuwun kangge lockdown.” “Jika santri berobat ke tempat kesehatan yang pro COVID-19 maka semua kegiatan di pondok pesantren akan di tutup dan kita diminta untuk *lockdown*.” (Wawancara dengan Kiai Huda, 23 Desember 2022).

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa Pondok Pesantren Jamil lebih memilih untuk diam. Hal ini membuat satgas desa maupun Puskesmas tidak mengadakan *swab* maupun *tracking* ke Pondok Pesantren Jamil. Dengan pondok pesantren yang tidak terbuka dan tidak adanya laporan ke Satgas dan Puskesmas membuat pihak kesehatan mengalami kendala dalam menangani penyebaran COVID-19.

c. Stigma Masyarakat kepada Pondok Pesantren Jamil

Adanya stigma masyarakat mengenai santri yang hidup bersama di satu lingkungan sehingga memudahkan penularan COVID-19. Pada masa ini citra pondok pesantren dianggap tidak baik karena dianggap *ngeyel* (sulit diatur) dari pemerintah. Untuk mengatasi hal tersebut, pondok pesantren memilih cara tersendiri dalam penerapan kebijakan. Dengan tidak sepenuhnya mengikuti kebijakan yang

diterapkan oleh pemerintah. Hal ini disampaikan oleh salah satu santri yaitu Iqbal (22 tahun):

“Ontene kebijakan COVID-19 ndamel angel para santri. Santri sering dianggap serba salah. Onten mikire santri kotor mergane sering sareng-sareng terus mboten resikan. Kulo nate wangsul meng ndalem malah teng tanggane diadoih. Padahal kulo wangsul sehat ngge rada pilek sekedik.” “Adanya kebijakan COVID-19 membuat sulit para santri. Santri sering dianggap serba salah. Ada yang berpikir santri kotor karena sering bersama-sama dan tidak menjaga kebersihan. Saya pernah pulang rumah dan dirumah oleh tetangga agak dijauhin karena pada takut saya membawa virus. Padahal saya pulang dengan keadaan sehat hanya saja agak pilek tetapi sebentar.” (Wawancara dengan Iqbal, 23 Desember 2022).

Selain santri, pengasuh pondok pesantren putri yaitu Nyai Ufid memiliki tanggapan emosional karena pengalamannya yang kurang baik dari kebijakan COVID-19. Bu Nyai pernah mengalami penolakan saat santri sakit oleh satu tokoh kesehatan di desa karena saat itu santri sakit dengan gejala COVID-19. Bahkan santri tidak diijinkan untuk masuk dan diperiksa. Oleh sebab itu, Nyai Ufid memilih memberikan pengobatan tersendiri kepada santri putri yaitu dengan memberikan obat yang sesuai kondisi santri yang sakit dan dibebaskan dari kegiatan pondok pesantren.

Hal ini disampaikan oleh Nyai Ufid dalam wawancara kepada penulis melalui pesan WhatsApp:

“Dulu pernah ada santri putri yang dibawa ke tokoh kesehatan. Santrinya sudah agak parah dengan badan lemes dan panas. Namun, sama bu bidan di tolak dan dibiarkan di becak sehingga saya bawa ke klinik dan ternyata santri itu bukan covid.” (Wawancara dengan Nyai Ufid, 31 Desember 2022).

Dengan adanya kejadian tersebut, membuat Pondok Pesantren Jamil menjadi enggan untuk berurusan dengan pihak kesehatan dari pemerintah. Stigma yang ada di dalam masyarakat kepada Pondok Pesantren Jamil sulit untuk dihapuskan dimasa pandemi COVID-19. Hal ini ditakutkan akan mengakibatkan penurunan peminat pendaftar santri di Pondok Pesantren Jamil.

d. Agama

Keyakinan adanya *qodarullah* (semua takdir hanya Allah yang memutuskan) yang membuat warga pondok pesantren terlihat kurang selaras dengan kebijakan COVID-19 dari pemerintah. Dalam penelitian Hilmy & Niam (2020) munculnya wabah COVID-19 bukan menjadi wabah virus pertama dalam sejarah umat Islam. Dengan hal ini, virus dapat dikatakan sebagai hukuman surgawi, bencana, takdir dan sarana politik. Selain itu, menurut mereka suatu penyakit lebih cepat sembuh jika manusia menjaga kesehatan yang kuat secara *bathiniyah*.

Dengan hal ini, pondok pesantren tidak mewajibkan santri untuk memakai masker di dalam pondok. Namun, untuk diluar ruangan mereka tetap memakai masker. Bagi beberapa santri pemakaian masker hanya sebuah formalitas supaya pondok pesantren tidak mendapatkan stigma buruk. Para santri lebih mempercayai adanya jodoh, kematian, dan kehidupan ini sudah diatur oleh Allah SWT yang

disebut dengan *qodarullah*. Oleh karena itu, hal ini dirasakan Iqbal (22 tahun) sebagai ketua pengurus santri putra yang biasa dikenal dengan lurah:

“Kulo mboten remen ngagem masker, ndamel pega soale nek diagem terus soale. nah menurut kulo ngge mboten ngaruh si nek wayaeh sedo ngge sedo. nek gerah ngge sitirahat. Menurut kulo, lebay asline wingi soale ngge jebul kan mboten sami kenging nopo-nopo.” “Saya tidak suka memamakai masker, soalnya membuat sesak jika dipakai terus menurus. Menurut saya tidak berpengaruh apapun karena jika sudah waktunya meninggal akan meninggal juga. Jika sakit maka istirahat. Menurut saya, aslinya terlalu berlebihan kemarin karena pada akhirnya tidak kenapa-kenapa.” (Wawancara dengan Iqbal, 23 Desember 2023).

Adanya tanggapan COVID-19 merupakan virus yang sama seperti virus lainnya membuat warga pondok pesantren lebih santai dan tidak ambil pusing untuk mengikuti kebijakan pemerintah. Hal ini juga terlihat dari Kiai sebagai pemimpin pondok pesantren yang tidak mengupayakan untuk pencegahan preventif COVID-19 secara matang. Selain itu, warga pondok pesantren mempercayai bahwa semua telah diatur oleh Allah SWT sehingga sebagai manusia hanya berprasangka baik dengan takdir yang ada.

e. Identitas Pribadi sebagai Santri

Kebiasaan santri yang dihilangkan akan mengurangi identitas santri. Oleh karena itu, pada saat berjabat tangan warga pondok pesantren akan melakukan *wirid*. Warga pondok pesantren meyakini dengan *wirid* dapat mengurangi risiko penularan karena jiwa mereka dalam kondisi tenang. Selain itu, di masa pandemi COVID-19 pondok pesantren tidak meliburkan para santri karena dapat mengurangi peran utama santri yaitu menjadi insan yang menanamkan jiwa keagamaan yang kuat supaya dapat bermanfaat di dalam masyarakat.

Hal ini disampaikan dalam penelitian Alhamuddin & Rosyadi Satria Hamdani (2018), untuk mencapai tujuan utama pondok pesantren menanamkan rasa keagamaan yang kuat dan terbukti mampu menanamkan jiwa dan mentalitas positif bagi pribadi para santri. Untuk dapat sepenuhnya menanamkan jiwa seperti itu dibutuhkan waktu yang tidak sebentar. Selain itu, dibutuhkan kesabaran dan ketekunan dari para pengasuh dan pendidik yang ada dipondok pesantren. Salah satunya adalah Nanang (17 tahun), menurutnya dengan adanya kebijakan COVID-19 tidak berdampak pada laju COVID-19, karena terlihat saat ini orang sudah jarang menggunakan masker dan tidak menerapkan protokol kesehatan tetapi tetap sehat.

“Kebijakan covid mboten ngaruh kale penularan covid, soale nek missal ngaruh mesti saniki katah sing kena covid. Nyatane saniki sami sehat-sehat mawon. Nek misal meninggal emang sampun kodarullah.” “Kebijakan covid tidak berpengaruh dengan penularan covid, soalnya misal berpengaruh maka saat ini banyak yang kena covid. Tapi nyatanya sekarang sehat-sehat saja. Kalo meninggalpun itu sudah *qodarullah* (takdir Allah SWT).” (Wawancara dengan Nanang, 17 Januari 2023).

Dari hasil wawancara di atas, dapat dilihat jika terdapat santri yang takut adanya COVID-19 maka identitas santri tersebut akan berkurang. Dengan sikap tenang yang telah di ajarkan di dalam pondok pesantren menjadi kunci utama dalam melawan COVID-19. Hal tersebut sesuai dengan pendidikan yang diberikan oleh

Kiai di dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan tersebut yaitu sabar, tawakal, dan berpasrah diri kepada Allah SWT.

Aspek tanggapan yang telah dijelaskan di atas menjadi salah satu penentu untuk bisa mengimplementasikan kebijakan COVID-19. Wajar jika banyak warga pondok pesantren yang tetap tidak mematuhi kebijakan COVID-19 terutama untuk kesehatan. Namun, warga pondok pesantren tetap mau mematuhi kebijakan COVID-19 asalkan sudah disetujui oleh Kiai sebagai pemimpin yang dihormati. Hal ini disebabkan oleh penanaman pendidikan sejak lama dari pondok pesantren secara kuat sehingga menentukan tindakan yang akan dilakukan oleh warga pondok pesantren.

Kesimpulan

Pondok pesantren sebagai sekolah berbasis Islam dengan adanya kepemimpinan Kiai memiliki cara tersendiri dalam mengimplementasikan suatu kebijakan dari pemerintah. Implementasi kebijakan COVID-19 disesuaikan dengan kondisi pondok pesantren sehingga terbentuk kebijakan secara *dzohir* (fisik) dan *bathiniyah* (batin). Dari kedua kebijakan tersebut membuat tiga perubahan yaitu perubahan komunikasi, berkurangnya komuter, dan perubahan sistem pendidikan. Selain itu, implementasi kebijakan menimbulkan berbagai tanggapan yang terdiri dari lima aspek yaitu rekomendasi kesehatan, sikap terhadap pemerintah, stigma, dan agama, dan identitas diri. Oleh sebab itu, suatu peristiwa yang cepat akan mampu mengubah tatanan sosial secara cepat. Dari perubahan yang cepat ini manusia dipaksa untuk beradaptasi sehingga akan banyak tanggapan yang ditunjukkan karena dari berbagai aspek tersebut. Dengan hal ini, kebijakan akan mudah di implementasikan jika terjadi keterbukaan dalam berbagai *stake holder* yang ada. Namun, dalam penerapannya pasti ada hambatan termasuk dari pemimpin itu sendiri. Dengan hal ini, perlu adanya penyesuaian kondisi yang ada di lingkungan pondok pesantren. Implementasi kebijakan melalui pendekatan agama dan pemuka agama yang disegani akan lebih bisa diterima oleh warga pondok pesantren dibandingkan dengan kebijakan yang hanya dikeluarkan oleh pemerintah.

Referensi

- Alhamuddin, A., & Rosyadi Satria Hamdani, F. F. (2018). Hidden Curriculum: Polarisasi Pesantren Dalam Upaya Membentuk Kesalehan Individu Dan Sosial (Case Study Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo). *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 5(1), 50–65. <https://doi.org/10.53627/jam.v5i1.3351>.
- Arifin, S., & Zaini, A. (2020). Decision of Implementing Uzlah and Gerbat Techniques in Islamic Boarding School as Preparedness Response for Covid-19 Pandemic. *Unnes Journal of Public Health*, 9(2), 126–134. <https://doi.org/10.15294/ujph.v9i2.38107>
- Baidowi, A., Salehudin, A., Mustaqim, A., Qudsy, S. Z., Hak, N., Islamic, S., Kalijaga, S., Islamic, S., & Islamic, S. (2021). *Theology of health of Quranic pesantren in the time of COVID-19*. 77, 1–11.

- <https://doi.org/10.4102/hts.v77i4.6452>.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Dhofier, Z. (1985). *Tradisi Pesantren*. LP3ES.
- Hahn, R. A., & Schoch-Spana, M. (2021). Anthropological foundations of public health; the case of COVID 19. *Preventive Medicine Reports*, 22. <https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2021.101331>.
- Hannan, A., Azizah, S., & Atiya, H. (2020). Dinamika Pesantren dalam Merespons Pandemi Covid-19 di Madura. *DINIKA: Academic Journal of Islamic Studies*, 2(4), 213–242. <https://doi.org/10.36548/jismac.2020.4>.
- Hilmy, M., & Niam, K. (2020). Disputes Over the Covid-19 Pandemic Plague. *Qudus International Journal of Islamic Studies (QIJIS)*, 8(2), 293–326. <https://doi.org/10.21043/qijis.v8i2.7670>.
- Israfil, I., Wiliyanarti, P. F., & Selasa, P. (2020). Literature Review: Risk of Death in Covid-19 Patients. *Unnes Journal of Public Health*, 9(2), 141–147. <https://doi.org/10.15294/ujph.v9i2.38121>.
- kemenag.go.id. (2020). *Ini Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pesantren dan Pendidikan Keagamaan di Masa Pandemi*. <https://kemenag.go.id/nasional/ini-panduan-penyelenggaraan-pembelajaran-pesantren-dan-pendidikan-keagamaan-di-masa-pandemi-230c3g>.
- Luth, L., & Meriwijaya, M. (2021). Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Penanganan Covid-19 Di Pondok Pesantren Modern Selamat Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. *Kybernan: Jurnal Studi Pemerintahan*, 4(1), 90–109. <https://doi.org/10.35326/kybernan.v4i1.1142>.
- Muashomah, L. (2016). Pendidikan Pondok Pesantren dalam Perspektif Ideologi-Ideologi Pendidikan. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*. <http://www.ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/view/120>.
- Munawaroh, A. Q., Muhtarom, M., Hapsari, T. I., & Waliko, W. (2021). Kondisi Mental Para Penghafal Al-Qur'an di Masa Pandemi. *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 6(1), 77–92. <https://doi.org/10.24090/maghza.v6i1.4616>.
- Muslimin. (2015). *Perilaku Antropologi Sosial Budaya dan Kesehatan*. Deepublish.
- Noor, M. (2019). Gaya Kepemimpinan Kiai. *Jurnal Kependidikan*, 7(1), 141–156. <https://doi.org/10.24090/jk.v7i1.2958>.
- Nugroho, R. (2021). *Kebijakan Publik: Implementasi dan Pengendalian Kebijakan*. Jakarta: Gramedia.
- Prawoto, I., Rohmah, S. N., & Sunarya, F. R. (2020). Peran Preventif Pemimpin Dalam Pencegahan Penyebaran COVID-19; Strategi Syaykh Al-Zaytun di Ma'had Al-Zaytun dan Kontribusinya Terhadap Masyarakat Sekitar. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(5), 403–422. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15571>.
- Salim, A., Dillah, I. U., & Susilowati, I. T. (2021). Islamic Boarding School

- Response to the Impact of COVID-19 in Maintaining the Pesantren Values. *International Journal of Islamic Educational Psychology*, 2(2), 177–190. <https://doi.org/10.18196/ijiep.v2i2.12731>.
- Serayunews.com. (2020). *Klaster Pesantren Tak Terbendung, Sehari 348 Santri Terpapar Covid*. <https://dinkes.cilacapkab.go.id/2020/10/16/klaster-pesantren-tak-terbendung-sehari-348-santri-terpapar-covid/>.
- Siregar, P. P., Sutan, R., & Mourisa, C. (2020). COVID-19 dan Penggunaan Masker Muka: Antara Manfaat dan Resiko. *Jurnal Implementa Husada*, 1(3), 221–231. <https://doi.org/10.30596/jih.v1i3.5799>.
- Sumardi, K. (2012). Potret Pendidikan Karakter Di Pondok Pesantren Salafiah. *Jurnal Pendidikan Karak*, 2(3), 280–292. <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/jpk.v0i3.1246>.
- Zahrotin, A. (2021). Penanganan Covid-19 Di Pondok Pesantren Tanbihul Ghofilin Banjarnegara Dengan Paradigma Mit Amin Abdullah. *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 21(2), 99–114. <https://doi.org/10.14421/aplikasia.v21i2.2541>.